

POINTER
BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA DPRD PROVINSI LAMPUNG
SENIN, 24 MEI 2021

1. RENSTRA DINAS PPPA TAHUN 2019-2024

Mengacu pada Visi “Rakyat Lampung Berjaya” dan 6 (enam) Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Dinas PPPA sebagai unsur Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar mendukung pencapaian Misi ke-3 yaitu **“Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas”** dan dengan sasaran RPJMD yaitu **“Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan Penyandang Disabilitas (perempuan dan Anak Berjaya)”**, dan Misi ke-2 yaitu **“Mewujudkan “Good Governance” untuk meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik”** dengan sasaran RPJMD yaitu **“Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi”**.

Gambar 1 : Indikator Kinerja Dinas PPPA 2019-2024

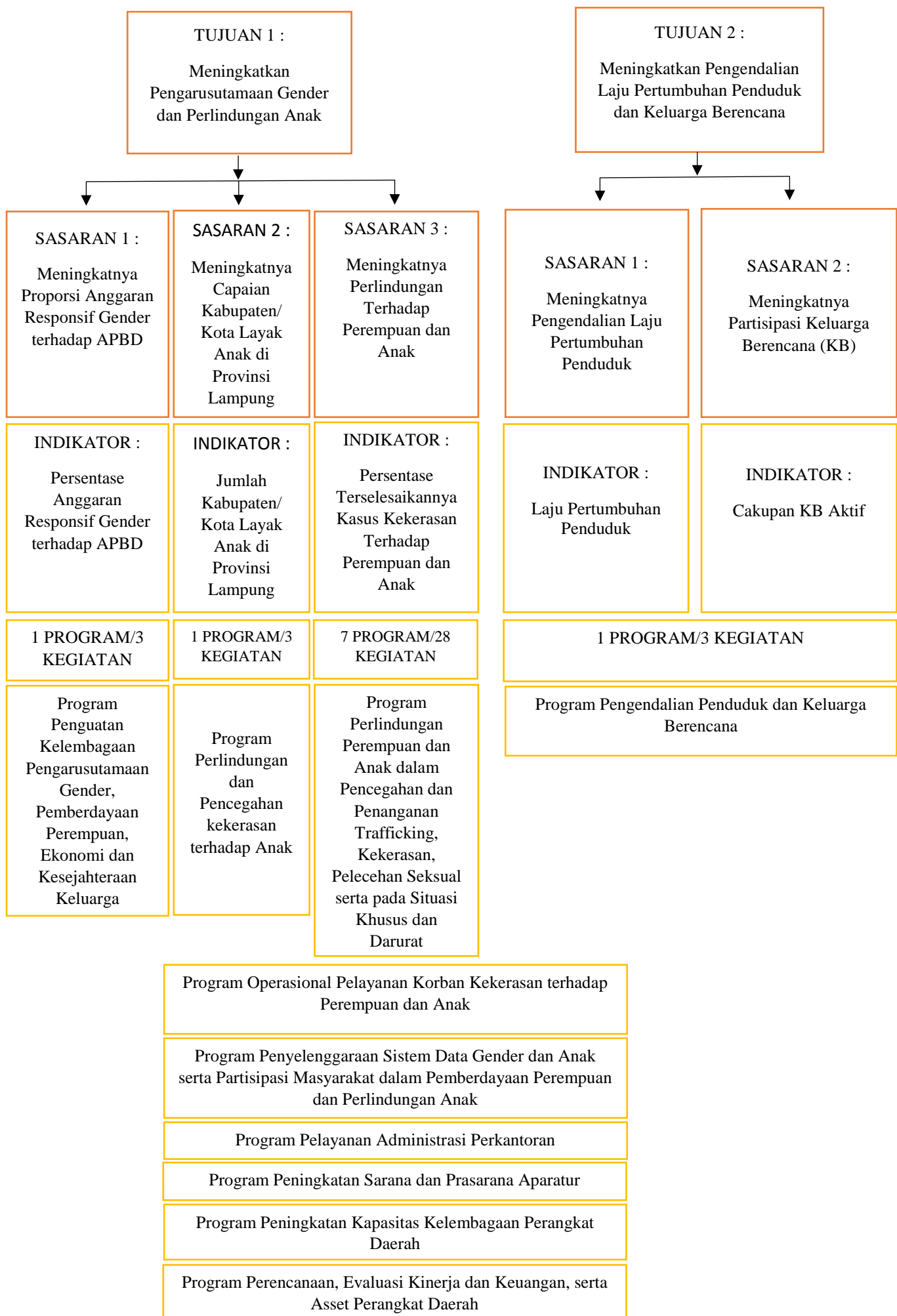


Berdasarkan hal tersebut, Dinas PPPA menetapkan Tujuan Renstra yaitu Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak dengan 3 “tiga” Sasaran dan 3 “tiga” Indikator Sasaran dan Meningkatkan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 2 “dua” sasaran serta 2 “dua” Indikator yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel : Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Dinas PPPA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a. Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	0,80%	0,90%	1,00%	1,01%	1,02%	1,02%
		b. Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	8 Kab/ Kota	10 Kab/ Kota	12 Kab/ Kota	13 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota
		c. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Terselesaikannya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %
2.	Meningkatkan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.87 %	1.33 %	1.03 %	1.02 %	1.01 %	1.01 %
		b. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif	15.9 %	18.8 %	23.5 %	29.7 %	32.8 %	32.8 %

Keterangan : Terdapat 2 “dua” Tujuan, 5 “lima” sasaran dan 5 “indikator



2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 Dinas PPPA melaksanakan 10 Program dan 37 Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 12.452.913.653,- yang terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung (BTL)	: Rp. 7.519.303.723,-
Belanja Langsung (BL)	: <u>Rp. 4.933.609.930,-</u>
Total	: Rp. 12.452.913.653,-

Adapun Realisasi Keuangan pada tahun 2020 dirangkum sebagai berikut :

Realisasi BTL adalah :

Belanja Tidak Langsung (BTL)	: Rp. 7.519.303.723,-
Realisasi BTL	: <u>Rp. 6.703.415.603,- (89.15%)</u>
Sisa	: Rp. 815.888.120,-

Realisasi Belanja Langsung adalah :

Belanja Langsung (BL)	: Rp. 4.933.609.930,-
Realisasi BL	: <u>Rp. 4.735.910.560,- (95.99)</u>
Sisa	: Rp. 197.699.370,-

3. HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- a) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 87,18 hingga pada tahun 2018 mencapai 90,57 namun pada tahun 2019 sedikit terjadi penurunan menjadi 90,39. Capaian ini masih sedikit di bawah capaian nasional yaitu sebesar 91,07.

Hal tersebut menunjukkan kesetaraan gender di Provinsi Lampung sedikit menjauh sehingga perlu upaya peningkatan kelembagaan PUG.

- b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Lampung dari tahun 2010 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi naik turun disetiap tahunnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu intervensi lebih lanjut terkait peran perempuan dalam pembangunan utamanya dalam bidang politik dan ekonomi yang dipandang masih belum optimal.

- c) Kabupaten/Kota yang memenuhi indikator KLA dari tahun 2018 sebanyak 3 Kabupaten/Kota di tahun 2019 meningkat menjadi 7 Kabupaten/Kota namun masih di bawah capaian target nasional, pada tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemic covid 19 penilaian KLA ditiadakan.

Upaya fasilitasi dan pendampingan kepada Kabupaten/Kota terus ditingkatkan menuju seluruh Kabupaten/Kota yang memenuhi indikator KLA.

- d) Kekerasan pada perempuan dan anak dalam setahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 terdata 151 kasus (37 kasus perempuan dan 114 kasus anak) dan pada tahun 2020 terdata 146 kasus (28 kasus perempuan dan 118 kasus anak).

Hal tersebut dikarenakan upaya pencegahan terus berjalan.. Namun demikian penurunan data kekerasan yang terjadi tersebut juga tidak menutup kemungkinan dikarenakan dari sikap tertutup keluarga yang menganggap peristiwa kekerasan yang menimpa korban (dalam rumah tangga) sebagai aib yang harus ditutupi. Hal ini menyulitkan pendamping untuk melakukan penanganan terhadap korban dan mengarahkan keluarga untuk mengambil langkah tepat bagi penyelesaian kasus, keamanan korban, dan kelanjutan hidupnya. Karena itu upaya sosialisasi untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak utamanya di rumah terus dilakukan dengan intens oleh UPT-PPA Provinsi Lampung.

- e) Terkait dengan data kasus, ditemukan kesulitan dalam perekaman data penanganan kasus yang seharusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ada beberapa kasus yang mendapat pelayanan kesehatan dan pendampingan hukum hingga tuntas namun luput terekam dalam buku data. Ini terjadi karena UPTD PPA memerlukan dukungan sumber daya manusia yang dapat menjalankan tugas rutin melakukan input data ke aplikasi SIMFONI-PPA, sistem informasi online untuk data kekerasan pada perempuan dan anak yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA RI.

- f) Persentase pemakaian kontrasepsi modern / mCPR pada pasangan usia subur di Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebesar 74,14 % diatas target/sasaran Provinsi Lampung sebesar 66,47 %.

- g) Unmet Need (PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak ber-KB) masih bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 Unmet Need pada PUS di Provinsi Lampung masih tergolong tinggi yaitu sebesar 12,004%.

Tingginya Unmet Need disebabkan rendahnya kesadaran PUS untuk ber-KB, disamping jumlah PLKB yang terbatas sehingga untuk menekan laju peningkatan Unmet Need belum dapat dilaksanakan secara optimal.

- h) Melemahnya ekonomi global pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 memberikan beban ganda bagi perempuan baik dari sisi ekonomi maupun keluarga, selain itu kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat.

Dampak Pandemi Covid 19 pada tahun 2020 juga mengakibatkan refocusing terhadap program kegiatan Dinas PPPA yang menyebabkan banyak target-target program kegiatan tidak tercapai dengan optimal.

- I) Penyusunan anggaran responsif gender adalah belum optimalnya implementasi PUG pada perangkat daerah di Provinsi Lampung. Anggaran responsif gender yang mencapai 2,82% dari APBD Provinsi Lampung masih sangat kecil dibandingkan target nasional yang mencapai 75%. Hal ini dikarenakan anggaran responsif gender yang disusun oleh PD hanya 1 atau 2 kegiatan, belum untuk sebagian besar kegiatan sesuai tupoksi Dinas masing-masing. Serta belum semua PD di Provinsi Lampung memiliki data terpilah gender yang merupakan instrument penting dalam penyusunan anggaran responsif gender. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam mendorong terlaksananya kesetaraan gender dalam sendi-sendi pembangunan masyarakat masih terus diperjuangkan. Lembaga pemerintah adalah motor penggerak paling penting dalam menentukan kebijakan pembangunan yang mampu menciptakan kesejahteraan tanpa diskriminasi, dan karenanya isu Kesetaraan Gender harus terus disuarakan.

4. CAPAIAN KINERJA RENSTRA S.D. TAHUN 2020

Memperhatikan capaian kinerja Secara umum, Dinas PPPA Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2020. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas PPPA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 5 (lima) indikator sasaran sebagai berikut.

Tabel : Capaian Indikator Kinerja Dinas PPPA Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	0,80%	2,82%	352.5%
2	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Kab/kota	8 Kab/ Kota	0	0%
3	Persentase Terelesaikannya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100 %	100%	100%
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.87 %	1,65	52,73%
5	Cakupan KB Aktif	%	15.9 %	74,45%	468,24%

5. BEBERAPA KELUARAN (=OUTPUT) UTAMA DARI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

BIDANG	OUTCOME	JUDUL DOKUMEN (OUTPUT)	
SEKRETARIAT	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
	Persentase Ketersediaan Sarpras Kantor	2	Pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan dinas dan perlengkapan kantor
	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	3	Anjab, Rekap Absen, Budaya Kerja, Terbentuknya SK TIM Reformasi Birokrasi ASN, Terbentuknya SK Agen Perubahan Budaya Kerja ASN, SK Pembentukan TIM Budaya Kerja ASN. Ada 2 SK Yaitu SK Dinas PP dan PA dan SK UPTD PPA.
	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi sesuai Peraturan	1	Laporan LPPD, LKPJ, LPPDLKPJAMJ, IKK 1.1, IKK 1.2, IKK 1.3, EVJA 2019, Laporan Kinerja Bulanan 2020, draft LKIP 2019, Laporan Evaluasi Renja Tri Wulan III/IV
		2	Laporan keuangan Bulanan
		3	PK 2020, RKT 2020, draft Renja 2021, Renja 2021 Pemetaan ProgKegiatan 2021, RKA 2021, KUA PPAS Th 2020, RKA Perubahan Th. 2020, DPA Perubahan Th. 2020, PK-Perubahan Th. 2020
		4	Dokumen asset
BIDANG DALDUK KB	Persentase Akseptor KB Aktif	1	Remaja memahami Program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KKI)
		2	Remaja memahami Program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
		3	Mengadakan Kegiata Sosialisasi penguatan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja (KRR) bagi mahasiswa/I SMKN/S SMAN/S Bandar Lampung
		4	pembinaan dan monitoring penguatan program KB
		5	Koordinas dan konsultasi rencana kegiatan tahun anggaran 2021 dengan perwakilan BKKBN Prov. Lampung
		6	Rakortek Renbang Bidang Dalduk dan KB bertempat di Hotel Aryaduta di Jakarta
		7	Menghadiri RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2020 bertempat di auditorium BKKBN Pusat di Jakarta
		8	Koordinasi dan Konsultasi terkait Program Nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024 bertempat di Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri
		9	Fasilitasi Pembinaan Keluarga Berencana

BIDANG	OUTCOME	JUDUL DOKUMEN (OUTPUT)	
		10	Koordinasi Monitoring Data dan Informasi Dalduk
		11	Monitoring dan Evaluasi kepada kader-kader Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga di 5 Kabupten.
		12	Monitoring data dan Informasi Dalduk KB di 6 Kab./Kota
BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, DAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	1	Rapat Evaluasi Penginputan Aplikasi APE Tahun 2020 Verifikasi lapangan oleh tim kementerian PPPA
		2	Pelaksanaan Penilaian APE oleh Tim Kementerian PPPA
		3	Sosialisasi Aplikasi APE bagi 15 Kab/Kota
		4	Rapat Pokja PUG & Pocal Point PUG
		5	Melaksanakan Sosialisasi APE
		6	Monitoring dan Evaluasi persiapan Verifikasi Lapangan Evaluasi PUG
		7	Pengadaan sembako keg. Bakti sosial dalam rangka menghadapi COVID 19 (Kaukus Parlemen)
		8	Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Pelebagaan dan Pelaksanaan PUG melalui APE
		9	Rapat Pokja Industri Rumahan peserta 75 org
		10	Rapat Persiapan Bimtek Ekonomi Kreatif peserta 60 org
		11	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PUG Ekonomi di 7 Kabupaten
		12	Terlaksananya Perjalanan Dinas di 8 Kab./Kota dalam Rangka Monitoring Evaluasi P3KSS dan GSI
		13	Rapat rutin dengan pengurus BKOW dan DWP
BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK	Jumlah Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	1	Rapat Pertemuan Forum Anak Daerah dan Penentuan SAI Tahun 2020
		2	Rapat dalam rangka Sosialisasi Permen PPPA tentang Penyelenggaraan Forum Anak Daerah
		3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Forum Anak di Kabupaten/Kota
		4	Perjalanan Dinas Dalam daerah ke kab. Mesuji dan Tulang Bawang dalam rangka Pemilihan Duta Anak
		5	Pelatihan Penguatan SRA dan PRA di Hotel Yunna terdiri dari 50 peserta dari 15 Kab/Kota
		6	Rapat Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) di Hotel Grand Praba dengan Peserta 55 peserta dari 15 Kab./Kota
		7	Perjalanan dinas dalam rangka roadshow KLA di 15 Kab./Kota

BIDANG	OUTCOME	JUDUL DOKUMEN (OUTPUT)	
		8	Rapat Follow Up Kegiatan Roadshow sebanyak 40 orang terdiri dari 30 orang di 15 Kab./Kota
		9	Bimtek Informasi Layak Anak (ILA) dengan peserta 50 orang di Hotel Whize Prime perwakilan dari 15 kab./kota sebanyak 30 orang dan 20 orang dari Dinas PPPA Provinsi
		10	Rapat Pembahasan Rapergub KLA di Biro Hukum sebanyak 20 orang di OPD Pemerintah Provinsi Lampung
		11	Rapat Kegiatan Program Tahunan Fiskal Tahun 2020-2021 bersama (YPSK) dan Lembaga Dana Atmaja (LDA) di Aula Dina PPPA
		12	Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah Kab./Kota Layak Anak sebanyak 60 orang dari perwakilan Gugus Tugas KLA di Provinsi Lampung
		13	Rapat Evaluasi Kab/Kota Layak Anak Tahun 2020 berbasis Website di Hotel Grand Praba sebanyak 50 peserta dari 15 kab/kota sebanyak 45 orang, dan 5 dari Dinas PPPA Provinsi
		14	Penguatan SRA dan PRA di Hotel YUNNA sebanyak 50 orang peserta dari 15 kab/kota sebanyak 45 orang dan 5 orang dari dinas PPPA Provinsi
		15	Rapat persiapan pembentukan PUSPAGA terdiri dari 30 peserta dari 15 Kab/Kota
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK, BIDANG DATA GENDER DAN ANAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT, dan UPTD PPA	Persentase Kader Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terlatih dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perempuan dan Anak		BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
		1	Koordinasi dan Monitoring pelaksanaan Perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan TPPPO
		2	Rapat Sosialisasi GP2SP Di Hotel Marcopolo dengan peserta berjumlah 60 orang dari OPD terkait dan Perusahaan
		3	koordinasi dan monitoring pelaksanaan PATBM
		4	pelatihan kader 30 peserta di Kab Pesibar dan tanggamus
		5	Pelayanan Medis UPT PKTK sebanyak 120 penanganan medis terdiri dari kasus asusila sebanyak 58 orang, KDRT 61 orang dan penganiayaan 1 orang
			UPTD PPA
		1	pelayanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 118 kasus (77 kasus perempuan, 41 kasus anak laki-laki, dan kasus anak perempuan)

BIDANG	OUTCOME	JUDUL DOKUMEN (OUTPUT)	
		2	Belanja modal untuk Rumah Aman
			BIDANG DATA GENDER DAN ANAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
		1	Konsultasi Program Partisipasi Masyarakat dan Program Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
		2	Monitoring data gender dan anak.
		3	Publikasi Pemasangan Baleho di 4 Kab/ Kota, SPPD Dalam Daerah ke Kab. Lamsel, Pesisir Barat, Mesuji dlm rangka Pemeliharaan dan Pemantauan Baleho
		4	Belanja Jasa Pihak ke Tiga Pembuatan Film Pendek